

Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD di Kecamatan Jambo Aye, Aceh Utara: Partisipasi *Stakeholder* Sebagai Variabel Moderasi

This research is intended to determine how much influence accountability and transparency have on the effectiveness of the management of School Operational Assistance (BOS) funds with Stakeholder Participation as a Moderation Variable in Elementary Schools (SD) in Tanah Jambo Aye District, Aceh Utara Regency. In this study, samples taken were all committees and treasurers of SD in Tanah Jambo Aye District, as many as 50 people. The data collection technique used in this study was to distribute questionnaires to all committees and treasurers of SD in Tanah Jambo Aye District, North Aceh Regency. The data analysis method used in this study is to use multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that accountability and transparency have a positive and significant effect on the effectiveness of the financial management of BOS funds at elementary schools in Tanah Jambo Aye District, Aceh Utara Regency. Then stakeholder participation was able to moderate the accountability, transparency and effectiveness of the management of BOS funds at SD in Tanah Jambo Aye District, North Aceh Regency. It is hoped that all school parties concerned should always be open to issues of accountability, transparency in the management of School Operational Assistance funds.

Keywords: *Accountability, Transparency, Effectiveness of BOS Fund Management, Stakeholder Participation*

**Muhammad Yusra¹,
Nur Afni Yunita²
Nurhasanah³, Arliansyah⁴**

^{1,2,3,4} Dosen Fakultas
Ekonomi dan Bisnis
Universitas Malikusaleh

Corresponding Author
myusra@unimal.ac.id

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi non personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi non personalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) / Rencana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RKAPBS), disamping dana yang diperoleh dari pemerintah daerah atau sumber lain yang sah. Oleh karena keterbatasan dana BOS dari pemerintah pusat, maka biaya untuk investasi sekolah dan kesejahteraan guru harus dibiayai dari sumber lainnya, dengan prioritas utama dari sumber pemerintah daerah.

Fenomena yang diketahui saat ini diketahui bahwa Kabupaten Aceh Utara sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Aceh yang diberikan dana BOS oleh pemerintah. Dana BOS merupakan salah satu dari beberapa kegiatan ataupun program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara yang berlangsung sejak tahun 2005. Program dana BOS tersebut di mulai dari pendidikan dasar hingga sekolah menengah pertama. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2019.

Saat ini dana BOS di provinsi Aceh sudah memasuki empat bulan dana BOS belum dicairkan oleh pemerintah. Akibatnya banyak kepala sekolah berutang pada pihak luar untuk keperluan belanja berbagai barang keperluan sekolah. Tidak cairnya dana BOS akan menimbulkan permasalahan dalam lingkungan pendidikan, misalkan salah satu fungsi dana BOS yaitu membayar gaji guru honorer, apabila dana BOS tidak bisa dicairkan, maka kemungkinan gaji untuk guru honorer yang bertugas sebagai pengajar di setiap sekolah tidak bisa diberikan. Adapun pembiayaan yang selama ini digunakan untuk menunjang dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Aceh Utara adalah bersumber APBN.

Pemerintah memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan terutama dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Aceh Utara.

Dana BOS yang disalurkan kepada tiap sekolah merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dimana pembiayaannya secara langsung diserahkan kepada pihak sekolah untuk dikelola sesuai dengan kebutuhan dengan berdasar kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah (Reubee, 2020).

Berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan oleh peneliti, permasalahan dana BOS juga dirasakan oleh sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Tanah Jambo Aye, khususnya sekolah tingkat SD yang tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada pihak sekolah yang tidak mencermati petunjuk Juknis dalam mengelola dana BOS, kemudian pengelolaan dana BOS tidak berjalan dengan baik diakibatkan saat ini pihak sekolah tidak menerima pencairan dana BOS dari pemerintah. Sehingga pihak sekolah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan yang digunakan dengan dana BOS. Hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya koordinasi antara kepala sekolah, bendahara BOS dan serta komite sekolah.

Jumlah dana BOS di Kecamatan Tanah Jambo Aye pada tahun 2019 yang diterima dari pemerintah untuk Sekolah Dasar sebesar Rp. 3.756.800.000. Anggaran tersebut sebaiknya dilakukan secara transparan oleh pihak komite sekolah. Sering terjadi setiap sekolah tidak melakukan kewajibannya untuk mengumumkan daftar komponen yang boleh dan tidak boleh dibiayai penggunaan dana BOS tersebut. Sehingga pada saat dana BOS tidak bisa dicairkan seperti yang terjadi saat ini, realisasi dana BOS pada tahun sebelumnya tidak mampu diselesaikan dan tidak bisa dilanjutkan ke tahun ini akibat tidak adanya pencairan dana BOS dari pemerintah. Pembelanjaan di luar aturan pendanaan yang dilakukan oleh pihak sekolah inilah yang menimbulkan sebuah masalah dalam pertanggungjawaban dana BOS sehingga tidak akuntabel.

Penelitian tentang efektifitas pengelolaan dana BOS sudah banyak dilakukan selama ini. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Modami (2012) menyebutkan pengelolaan dana BOS belum efektif dikarenakan mekanisme pencairan dari pemerintah pusat ke daerah yang begitu panjang memperlambat pencairan sampai di sekolah. Penelitian Erwantosi (2010) menunjukkan pengelolaan program BOS belum efektif sehingga tidak tepat sasaran, kurang akuntabel dan transparansi masih lemah. Berbeda dengan penelitian Kusno (2012) yang menunjukkan pengelolaan dana BOS baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada sehingga dapat disimpulkan sudah berjalan efektif. Penelitian Pratama (2013) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, transparansi pemerintahan dan

akuntabilitas publik tidak terdapat hubungan yang positif terhadap efisiensi penyaluran dana BOS.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi”.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara ?
2. Untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.
3. Untuk menganalisis apakah partisipasi stakeholder mampu memoderasi antara akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.
4. Untuk menganalisis partisipasi stakeholder mampu memoderasi antara transparansi dan efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.
5. Untuk menganalisis partisipasi stakeholder mampu memoderasi efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara

KAJIAN PUSTAKA

Akuntabilitas

Menurut Adisasmita (2011:89) menjelaskan bahwa “akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomis, efisiensi, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi”. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian terpenting dalam mengukur kinerja pemerintah daerah, dimana hasil pertanggungjawaban laporan keuangan memiliki pengaruh yang besar dalam menilai baik buruknya kinerja pemerintah. Semakin akuntabel tingkat pengelolaan keuangan daerah maka akan semakin baik pula tingkat pencapaian kinerja pemerintah.

Transparansi

Menurut Krina (2010:34) prinsip transparansi memiliki dua aspek yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses

informasi. Keterbukaan pihak sekolah terhadap informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat dan pihak luar diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Efektivitas Pengelolaan Dana BOS

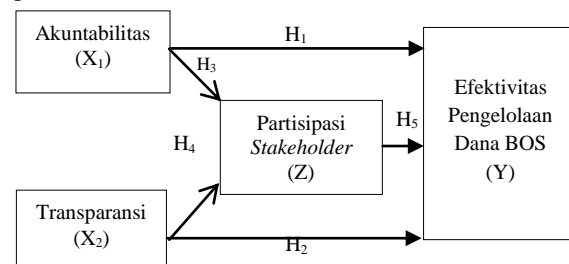
Menurut Indriana (2013:36) menjelaskan efektivitas dapat dilihat berdasarkan teori sistem dan dimensi waktu. Berdasarkan teori sistem, kriteria efektivitas harus mencerminkan keseluruhan siklus input-output yaitu harus mencerminkan hubungan timbal balik antara manajemen berbasis sekolah dan lingkungannya.

Partisipasi Stakeholder

Menurut Abdullah (2015:40) secara sederhana arti *stakeholders* adalah “Kelompok-kelompok yang memengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh korporasi sebagai dampak dari aktivitasnya.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah:



Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- H₁ = Ada pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS pada SD di Kec. Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara
- H₂ = Ada pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS pada SD di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara
- H₃ = Ada hubungan partisipasi *stakeholder* dengan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana BOS pada SD di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara
- H₄ = Ada hubungan partisipasi *stakeholder* dengan transparansi dan efektivitas pengelolaan dana BOS pada SD di Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara
- H₅ = Ada hubungan partisipasi *stakeholder* dengan efektivitas pengelolaan dana BOS pada SD di Kec. Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh komite sekolah dan bendahara SD di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara sebanyak 50 orang. Sampel yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu seluruh komite sekolah dan bendahara di SD di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara sebanyak 56 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah suatu alat pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan tertulis yang diajukan kepada subyek untuk mendapatkan jawaban secara tertulis tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan partisipasi *stakeholder* sebagai variabel moderasi pada SD di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum SD di Kec. Tanah Jambo Aye

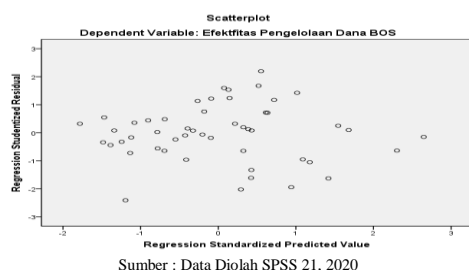
Kabupaten Aceh Utara merupakan bagian dari Provinsi Aceh yang berada di sebelah utara. Berdasarkan Peta Bakosurtanal skala 1 : 50.000, maka secara geografis Kabupaten Aceh Utara terletak pada posisi 960 47' – 970 31' Bujur Timur dan 040 43' – 050 16' Lintang Utara. Batas wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan wilayah lainnya adalah:

Secara administratif Kabupaten Aceh Utara memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Selat Malaka
2. Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Timur
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Aceh Tengah
4. Sebelah Barat : Kabupaten Bireun

Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah pantai timur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan pusat pemerintahan berada di kota Lhoksukon. Sebagaimana wilayah pantai timur Sumatera Umumnya, Kabupaten ini dilalui oleh jalan negara yang merupakan jalur transportasi regional Medan-Banda Aceh.

Uji Heteroskedastisitas



Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu atau tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di

atas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Regresi Linier Berganda

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,886	,618		1,434	,158
	Akuntabilitas	,199	,089	,219	2,226	,031
	Transparansi	1,058	,139	,752	7,635	,000

Sumber : Data Diolah SPSS 21, 2020

Dari hasil perhitungan regresi berganda sesuai dengan tabel 4.15 diatas, maka diperoleh parameter untuk masing-masing variabel sebagai berikut :

$$Y = 0,886 + 0,199X_1 + 1,058X_2 + e$$

Persamaan diatas merupakan model regresi linier berganda dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta pada angka sebesar 0,886 menunjukkan bahwa jika variabel akuntabilitas dan transparansi tidak mengalami perubahan, maka variabel Efektivitas Pengelolaan Dana BOS memiliki nilai 0,886.

Koefisien regresi akuntabilitas (X_1) yang dihasilkan sebesar 0,199 yang artinya memiliki nilai yang positif. Jika diasumsikan variabel independen lain konstan, hal ini berarti bahwa setiap kenaikan akuntabilitas sebesar 1 satuan maka akan menaikkan nilai efektivitas pengelolaan dana BOS sebesar 0,199 satuan, demikian sebaliknya apabila akuntabilitas kurang dari 1 maka akan menurunkan nilai efektivitas pengelolaan dana BOS.

Tabel 2. Hasil Uji t

Variabel Penelitian	t-Tabel	t-Statistik	Probabilitas
Akuntabilitas		2,226	0,031
Transparansi	2,013	7,635	0,000

Sumber: Data Diolah SPSS 21, 2020

Variabel Akuntabilitas (X_1)

Berdasarkan hasil perhitungan $t_{tabel} = (\alpha/2; n-k-1)$ yang berarti $t_{tabel} = (0,05/2; 50-3-1) = 0,025; 46$ dan ditemukan nilai t_{tabel} pada tabel distribusisebesar 2,013. Hasil uji t didapatkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,226 > 2,013$ dengan tingkat signifikan $0,031 < 0,05$, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas (X_1) berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf 5% yang berarti H_0 ditolak dan

Ha diterima. Dengan demikian, maka Hipotesis pertama diterima.

Variabel Transparansi (X_2)

Berdasarkan hasil perhitungan $t_{tabel} = (\alpha/2; n-k-1)$ yang berarti $t_{tabel} = (0,05/2; 50-3-1) = 0,025; 46$ dan ditemukan nilai t_{tabel} pada tabel distribusisebesar 2,013. Hasil uji t didapatkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $7,635 > 2,013$ dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa transparansi (X_2) berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf 5% yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, maka Hipotesis kedua diterima.

Tabel 3. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	11,974	2	5,987	29,587	,000 ^a
Residual	9,510	47	,202		
Total	21,484	49			

Sumber: Data Diolah SPSS 21, 2020

Pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dilakukan dengan menggunakan uji F. Perhitungan nilai F_{tabel} diketahui $df_1 = k-1$ yang berarti $df_1 = 3-1 = 2$ dan $df_2 = n-k$ yang berarti $df_2 = 50-3-1 = 46$ artinya nilai df adalah 2;46. Berdasarkan tabel distribusi maka ditemukan nilai F_{tabel} sebesar 3,20. Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai $F_{hitung} = 29,587 > 3,20$ dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa secara bersama-sama akuntabilitas (X_1) dan transparansi (X_2) berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.

Pembahasan Pengaruh Akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS pada SD di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS pada SD di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Tujuan akuntabilitas adalah agar terciptanya kepercayaan publik. Kepercayaan publik yang tinggi akan sekolah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen sekolah. Mekanisme akuntabilitas meliputi beberapa aspek yaitu siapa yang harus melakukan akuntabilitas, kepada siapa akuntabilitas ini dilakukan, untuk apa

akuntabilitas dilakukan, dan bagaimana akuntabilitas ini dilaksanakan. Mekanisme akuntabilitas ini sangat bergantung pada kondisi dan sistem yang ada pada masing-masing instansi, termasuk pihak sekolah dalam mengatur pengelolaan dana BOS.

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja tetapi menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pemakainya dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik, dan berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti membuktikan bahwa akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan publik pada kinerja pemerintah Kota Lhokseumawe.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2018) yang menyebutkan bahwa akuntabilitas mampu mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana BOS. Demikian halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Dedi (2019) juga menyebutkan bahwa akuntabilitas mampu mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana BOS.

Pengaruh Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan dana BOS pada SD di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS pada SD di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.

Transparansi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintahan atas penggunaan keuangan daerah kepada masyarakat. Oleh karena itu, transparansi merupakan salah satu elemen penting demi terwujudnya *good governance* yang menjamin kemudahan dan kebebasan akses bagi publik untuk memperoleh berbagai macam informasi termasuk informasi keuangan berupa laporan keuangan pemerintahan daerah. Transparansi bertujuan dalam menciptakan kepercayaan timbal balik antara sekolah dan publik melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat. Transparansi dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi yang dapat di akses secara bebas oleh mereka yang membutuhkan, dan informasi tersebut disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat *monitoring* dan evaluasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmi (2017) yang menyebutkan bahwa transparansi mampu mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana Bos. Demikian halnya dengan

penelitian yang dilakukan oleh Frederik dkk (2020) yang menyebutkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.

Partisipasi Stakeholder mampu Mempengaruhi Akuntabilitas dengan Efektivitas Pengelolaan Dana BOS pada SD di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi *stakeholder* mampu mempengaruhi akuntabilitas dengan efektivitas pengelolaan dana BOS pada SD di Kecamatan Tanah Jambo Aye.

Akuntabilitas diukur dari pertanggungjawaban baik tertulis maupun lisan yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap komite dan bendahara sekolah. Pertanggungjawaban bukan hanya hak komite sekolah, namun juga segenap masyarakat terlebih wali murid. Dengan akuntabilitas yang tinggi, komite sekolah juga terlibat dan ikut bertanggungjawab terhadap mutu dan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, sehingga termotivasi untuk mengoptimalkan perandan fungsi komite sekolah. Kemudian setiap kepala sekolah wajib menyampaikan laporan keuangan terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran sekolah terhadap Komite Sekolah dan Pemerintah Standar akuntansi keuangan diberlakukan sebagai kriteria pelaporan untuk menjamin akuntabilitas publik. Hal ini tercermin secara nyata bahwa akuntabilitas akan menumbuhkan kepercayaan dan meningkatkan partisipasi bahkan mendorong keberlangsungan kinerja manajemen sekolah agar lebih baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iswayudi dkk (2016) yang menyebutkan bahwa akuntabilitas memiliki keterkaitan dengan partisipasi stakeholder dalam pengelolaan anggaran. Demikian halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharmakarja (2020) yang menyebutkan bahwa partisipasi stakeholder dan partisipasi stakeholder mampu mempengaruhi persepsi dalam pengelolaan anggaran.

Partisipasi Stakeholder mampu Mempengaruhi Transparansi pada SD di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi *stakeholder* mampu mempengaruhi akuntabilitas dengan efektivitas pengelolaan dana BOS pada SD di Kecamatan Tanah Jambo Aye.

Stakeholder merupakan sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Sedangkan prinsip dari transparansi itu sendiri memiliki kedudukan yang penting dalam implementasi konsep pengelolaan dana. Melalui informasi yang transparansi, dan mudah diakses, akan memudahkan publik untuk memahami dan berpartisipasi secara nyata dalam proses-proses yang berkepentingan dengan publik.

Transparansi informasi akan membuka ruang transaksi sosial antara *stakeholder* dengan pemerintahan. Dapat dikatakan bahwa melalui transparansi akan menjamin terwujudnya efektivitas pengelolaan dana yang baik dengan cara pemerintah harus menghasilkan informasi yang berkualitas sehingga menimbulkan kepercayaan bagi semua pihak yang berkepentingan. Transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan dana berdasarkan aturan dari pemerintah mensyaratkan keterbukaan pihak pemerintah daerah dalam proses pembuatan keputusan atau kebijakan atau pelaporan-pelaporan atas kerjanya sehingga publik dapat mengetahui, mengkaji dan memberikan masukan serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah serta dengan pihak yang terkait sehingga dapat mewujudkan efektivitas pengelolaan dana yang baik.

Kewajiban pihak sekolah untuk memberikan kemudahan informasi terhadap pengguna jasa pendidikan harus dipenuhi untuk mewujudkan transparansi sehingga menimbulkan efek timbal balik antara pihak internal maupun eksternal sekolah, serta meningkatkan pengawasan terhadap mutu pendidikan. Apabila pihak sekolah terlalu besar mendominasi keputusan dengan kurang bijaksana, maka akan berdampak terhadap dukungan pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. *Stakeholder* memiliki hak untuk disediakan informasi mengenai pengaruh stakeholder terhadap organisasi, sekalipun stakeholder memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut ataupun stakeholder tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap keberlangsungan organisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati (2018) yang menyebutkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi anggaran. Demikian halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2016) yang menyebutkan bahwa partisipasi stakeholder berperan penting dalam pelaksanaan program pengelolaan anggaran dana BOS.

Partisipasi Stakeholder mampu Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Dana BOS pada SD di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi *stakeholder* mampu mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana BOS pada SD di Kecamatan Tanah Jambo Aye.

Sekolah dalam mewujudkan pendidikan dasar yang bermutu maka salah satu program berskala nasional yang diterapkan adalah adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS diberikan kepada sekolah per tahun berdasarkan jumlah siswa yang dimiliki sekolah tersebut. Besaran dana BOS yang diterima sekolah bervariasi, tergantung kepada

tingkatan sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah. Makin tinggi tingkatan sekolahnya maka makin besar pula dana BOS untuk tiap anak yang akan diterima oleh sekolah. Dana BOS yang diperoleh tersebut seringkali tidak jelas penggunaannya. Padahal untuk terciptanya tata kelola yang baik harus ada kejelasan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana BOS yang sudah diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2018) yang menyebutkan bahwa partisipasi *stakeholder* mampu memoderasi efektivitas pengelolaan dana BOS. Demikian dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati (2018) yang menyebutkan bahwa ada ketrkaitan antara partisipasi *stakeholder* dengan efektivitas pengelolaan anggaran dalam pengelolaan anggaran.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dengan Partisipasi Stakeholder sebagai Variabel Moderasi pada SD di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara”, maka kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS pada SD di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.
2. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS pada SD di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi *stakeholder* mampu mempengaruhi akuntabilitas dengan efektivitas pengelolaan dana BOS pada SD di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.

4. Partisipasi *stakeholder* mampu mempengaruhi transparansi dengan efektivitas pengelolaan dana BOS pada SD di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.
5. Partisipasi *stakeholder* mampu mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana BOS pada SD di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan laporan realisasi penggunaan dana BOS untuk kedepannya harus diperbaiki karena masih ada beberapa hal yang masih belum terealisasi dengan baik dan untuk pencatatan pembukuan harus benar-benar sesuai dengan uang yang ada. Untuk selanjutnya, pihak sekolah harus lebih menghimbau wali murid untuk benar-benar memperhatikan laporan yang sekolah berikan agar semua wali murid mengetahui dengan pasti kinerja sekolah.
2. Diharapkan sekolah harus benar-benar memprediksikan dengan teliti kegiatan apa saja yang akan dilakukan sekolah selama enam bulan ke depan. Selain pembuatan RKAS pihak sekolah harus memperhatikan penggunaan dananya agar tidak terlalu jauh dari dana yang dianggarkan. Untuk itu dewan komite harus lebih dapat memberikan masukan dan penilaian terhadap RKAS dan penggunaan dan yang dilakukan sekolah.
3. Diharapkan kepada pengelola dana BOS untuk terus memantau penggunaan dana BOS dan melakukan pemantauan terhadap proses akuntabilitas dan transparansi keuangan dana BOS agar dapat melaksanakan aturan-aturan yang berlaku sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang berkualitas dan menjadikan sekolah yang bermutu.

REFERENSI

- Abdullah, Ma'ruf. (2015). Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan. Aswaja Pressindo. Yogyakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. (2011). Manajemen Pemerintah Daerah. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta
- Adrianto, Nico. (2014). *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Bayumedia Publishing. Malang
- Budiyono. (2010). Posisi Stakeholder Dan Strategi Advokasi Kibbla Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. Volume 13 Nomor 03 September 2010
- Djarwanto. (2011). Pokok-Pokok Analisis Laporan Keuangan. Edisi Kedua. BPFE. Yogyakarta.
- Ellwood, Sheila. (2011). *Parish and Town Councils: Financial Accountability and Managemant, Local Government Studies*. Vol: 19:pp 368-386.
- Ghozali, Imam. (2005). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Hamid, Muhammad. (2011). Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Jakarta.
- Hery. (2009). Akuntansi Keuangan Menengah. Bumi Aksara. Jakarta.
- Indriana, St Zulfaidah. (2013). Efektifitas, Efisiensi dan Produktifitas Manajemen Berbasis Sekolah. Diakses tanggal 23 Juli 2014 dari <http://zulfaidah-indriana.blogspot.com/2013/05/efektivitas-efisiensi-dan-produktivitas.html>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2020.
- Kompri. (2014). Manajemen Sekolah Teori dan Praktek. Alfabeta. Bandung.
- Krina, P dan Loina Lalolo. (2010). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akunbilitas, Transparansi dan Partisipasi. Sekretariat Good Publik Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Mahmudi, (2013). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Sekolah Tinggi IlmuManajemen YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). Akuntabilitas Sektor Publik. Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mohammad. (2011). Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik. Salemba Empat. Jakarta.
- Mulyono. (2010). Konsep Pembiayaan Pendidikan. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.